



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 87 /M.RB.06/2021
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2020

31 Maret 2021

YTH. SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

DI

JAKARTA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Sekretariat Jenderal MPR RI (Setjen MPR RI). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI di tahun 2020 adalah **72,06** atau kategori "**BB**". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	16,61
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,60
	III. Reform	30,00	18,44
	Total Komponen Pengungkit	60,00	40,65

B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,37
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,83
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,18
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,04
Total Komponen Hasil		40,00	31,41
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	72,06

2. Berikut hasil antara dari masing-masing instansi *leading sector* yang telah diterima oleh Kementerian PANRB:

No.	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	84,17	Arsip Nasional Republik Indonesia
2.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0-100	0,00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
3.	Kualitas Pengelolaan Keuangan	0-100	93,77	Kementerian Keuangan
4.	Maturitas SPIP	0-5	3,01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5.	Kapabilitas APIP	0-5	2,08	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi adalah:
- Roadmap* Reformasi Birokrasi Setjen MPR RI masih belum diformalkan sehingga setiap Deputi belum bisa menyusun rencana kerja reformasi birokrasi juga;
 - Pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI belum dilaksanakan secara terpadu oleh kelompok kerja (Pokja) yang ada di pusat dan unit kerja. Pengisian PMPRB hanya dilaksanakan oleh tim reformasi birokrasi pusat;
 - Tindak Lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dilaksanakan secara menyeluruh;
 - Peta proses bisnis Setjen MPR RI telah disusun dan diturunkan menjadi SOP, namun proses bisnis ini masih berdasarkan pada struktur organisasi sebelumnya. Selain itu, penerapan *e-government* secara terintegrasi masih

- terus berproses sehingga belum terlalu signifikan mengungkit perbaikan pada layanan, baik layanan internal maupun eksternal;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan merit *system* antara lain mengenai tindak lanjut hasil asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum adanya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi;
 - f. Belum adanya penyelarasan indikator kinerja dari level organisasi sampai dengan level individu, sehingga masih terdapat kegiatan yang dilakukan oleh pegawai belum berkontribusi secara langsung terhadap kinerja level di atasnya. Di samping itu, hasil survei internal organisasi menunjukkan masih cukup banyak pegawai yang belum memahami kontribusi kinerjanya pada organisasi;
 - g. Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2020 belum berhasil mewujudkan unit kerja yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari satu unit kerja yang diajukan.

4. Penjelasan terkait komponen hasil antara lain sebagai berikut:

- a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Setjen MPR RI tahun 2019 menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih perlu perbaikan lebih lanjut, dengan nilai SAKIP 62,41 atau Predikat B dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan dari Setjen MPR RI menunjukkan hasil yang masih memerlukan peningkatan lebih lanjut, sebagaimana pada tabel berikut:

No.	Hasil Survei	Indeks	
		2019	2020
1.	Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	3,29	3,53
2.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,59	3,67

- 1) Hasil survei kualitas pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,53 dari skala 4. Apabila dibandingkan survei tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 0,24. Peningkatan hasil survei kualitas pelayanan ini mengindikasikan adanya kenaikan persepsi masyarakat dan *stakeholders* terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan;
 - 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan angka 3,67 dari skala 4. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yang menunjukkan hasil 3,59 maka terdapat peningkatan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi di Setjen MPR RI.
- c. Hasil survei internal terhadap pegawai Setjen MPR RI atas integritas jabatan menunjukkan indeks **2,59** dari skala 5, dengan rincian sebagai berikut:



Sebanyak 16% responden memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, ukuran, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 36% responden memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusinya terhadap organisasi; sebanyak 36% responden hanya memahami kinerja individunya saja; sedangkan sisanya terdapat 12% responden yang sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak

memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kinerjanya terhadap kinerja organisasi.

5. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja, dan melayani di Setjen MPR RI, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:
 - a. Segera menyelesaikan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2020-2024 untuk selanjutnya setiap Deputy menindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja reformasi birokrasi;
 - b. Melaksanakan reformasi birokrasi sampai pada unit kerja terkecil, tidak hanya di tim reformasi birokrasi pusat saja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi juga diperlukan untuk memantau sejauh mana reformasi birokrasi sudah berjalan;
 - c. Mengoptimalkan fungsi Tim Reformasi Birokrasi, asesor, dan Tim Penilai Internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan;
 - d. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d. 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkrit Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional;
 - e. Melakukan rewiu dan penyempurnaan peta proses bisnis sesuai dengan struktur organisasi yang terbaru sehingga peta proses bisnis yang ada dapat digunakan untuk memaksimalkan pencapaian kinerja. Selanjutnya, perlu melakukan optimalisasi penerapan *e-government* yang terintegrasi dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala;

- f. Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- g. Menyempurnakan ukuran kinerja organisasi sampai dengan individu sehingga lebih berorientasi hasil. Selanjutnya melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut dan menggunakan hasilnya sebagai dasar dalam memberikan apresiasi/penghargaan ataupun sanksi bagi pegawai;
- h. Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistle Blowing System*, dan kebijakan benturan kepentingan. Selain itu juga memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja;
- i. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Setjen MPR RI.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Setjen MPR RI. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar seluruh upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**



Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
2. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
3. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.